KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Capai target zero ODOL 2027, lakukan penertiban mulai sekrang...
Tanggal : Minggu, 12 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Capai Target Zero ODOL 2027

Lakukan Penertiban Mulai Sekarang...


FOTO: FRAKSI PKS

Ghufran

ANGGOTA Komisi V DPR Ghufran mendesak Pemerintah segera memulai operasi penertiban truk *Over Dimension Over Load* (ODOL) secara tegas dan menyeluruh. Langkah konkret itu harus dilakukan sekarang guna mencapai target Zero ODOL pada 2027.

Ghufran menilai, persoalan truk ODOL sudah jadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan serta penyebab utama kerusakan infrastruktur. Penertiban tidak bisa lagi ditunda, karena kerugian yang ditimbulkan sudah sangat besar. Hasil penertibannya harus segera dirasakan seluruh masyarakat.

Dia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun pendekatan hulu ke hilir guna menata ekosistem logistik nasional. Namun, implementasi di lapangan harus konsisten, tanpa tebang pilih dan tanpa kompromi. "Penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah agar memberikan efek jera kepada para pelanggar," tegasnya, kemarin.

Ghufran mengingatkan soal pembagian tanggung jawab yang adil dalam rantai logistik, agar sopir tidak terus jadi pihak paling dirugikan. Selama ini, pengemudi sering jadi korban, padahal praktik ODOL melibatkan pemilik barang. Semua pihak harus dimintai pertanggungjawaban yang sama di mata hukum, serta proporsional sesuai perannya.

Selain itu, dia mendorong Pemerintah menyiapkan solusi konkret bagi pelaku usaha melalui pemberian insentif serta pembenahan sistem logistik nasional. Penertiban harus diiringi langkah solutif supaya efisiensi tetap terjaga. Pelaku usaha diharapkan tidak merasa dirugikan secara sepihak oleh kebijakan penertiban itu.

Ghufran menegaskan, keselamatan masyarakat tidak bisa ditawar dan harus jadi prioritas utama dalam kebijakan transportasi nasional. Praktik ODOL harus segera dihentikan demi mencegah jatuhnya korban jiwa. "Target mewujudkan Zero ODOL pada 2027 merupakan komitmen besar yang harus dicapai bersama oleh semua pemangku kepentingan," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto menambahkan, kebijakan Zero ODOL tidak mudah diterapkan karena berpotensi memicu inflasi di sektor logistik. Kondisi jalan kabupaten atau kota yang belum optimal masih jadi persoalan utama infrastruktur. Tantangan di daerah berbeda dengan jalan nasional.

Kondisi jalan daerah yang kurang baik berdampak buruk pada distribusi barang serta mempercepat kerusakan infrastruktur fisik. Salah satu penyebab utamanya adalah kendaraan bermuatan lebih yang memperpendek usia jalan. Karena itulah Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan untuk menekan tingkat kerusakan jalan yang semakin parah.

Menurutnya, peningkatan biaya logistik pada akhirnya bisa mendorong kenaikan harga barang di pasar. Ekosistem logistik akan mengalami guncangan jika penerapan aturan dilakukan secara mendadak tanpa pertimbangan. ■ PYB